

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB UMUM

Oleh:

Imas Kurniawaty¹⁾, Aiman Faiz²⁾

¹Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Cirebon

e-mail: i.kurniawaty@upi.edu

e-mail: aimanfaiz@umc.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kebijakan serta kendala dalam pengembangan mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Polman. Metode yang digunakan adalah metode deksriptif analisis pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada dosen dan mahasiswa Polman, observasi dan dokumentasi. Pengajaran MKWU PKn di Polman ini sudah berjalan dengan baik. Pedoman kurikulum telah merujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah: (1) MKWU dititipkan pada Unit Sosio Manufaktur (USM); (2) Pengajar MKWU PKn tidak ditangani oleh dosen lulusan PKn; (3) Dosen PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dalam proses pembelajaran cenderung mengajarkan ilmu Kewarganegaraan, bukan Pendidikan Kewarganegaraan; (4) Beban studi per semester selama 21 minggu dengan bobot sks yang banyak serta menggunakan sistem blok antara teori dan praktek; (5) Adanya program penyelesaian MKWU selama 3 minggu; (6) MKWU tidak diajarkan pada semester awal (semester 1 dan 2), melainkan diajarkan pada semester akhir (semester 5).

Kata kunci: implementasi kebijakan, pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah wajib umum

1. PENDAHULUAN

Hakikat pembelajaran di Pendidikan Tinggi adalah memperluas cakrawala berpikir mahasiswa, kesempatan berdialog dengan individu dari ilmu lain, kesempatan memperkaya kajian untuk pembuatan keputusan yang komprehensif, memperkaya dan menajamkan kemampuan analisis dan sintesisnya (Kemenristekdikti, 2017).

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan seperti korupsi, narkoba, hilangnya rasa cinta tanah air, menurunnya rasa bela negara, hingga ketidakpuasan masyarakat yang diwujudkan dalam demo-demo anarkis yang menunjukkan buntunya komunikasi antar pihak di Indonesia. Permasalahan diatas melanda generasi muda bangsa Indonesia. Bahkan bukan hanya generasi muda, anak di bawah umur saja bisa melakukan tindakan melanggar nilai moral. Dalam artikelnya Faiz et al., (2021) merangkum bahwa ada seorang siswa SD kelas V melakukan aksi kriminal, dengan mencuri motor (curanmor). Anak tersebut sudah 3 Kali Mencuri Motor, namun bukan untuk dijual, melainkan anak tersebut hanya ingin menaiki kendaraan saja, jika bensinnya sudah habis maka akan ia tinggal untuk mencari motor lain (TribunNews, 2021).

Selain itu juga, tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia yang intelek, beriman dan bertaqwa sekaligus matang secara emosional. Namun yang terjadi dalam tataran praksis, pendidikan masih menekankan pada kemampuan teoritis-kognitif saja.

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang menyebabkan melemahnya pendidikan di Indonesia, maka diselenggarakan Pendidikan Umum atau yang sering kita sebut mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional menyentuh tiga ranah dalam pendidikan, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor secara utuh dan seimbang.

Pendidikan Umum di perguruan Tinggi mempunyai tujuan untuk:

- 1) Sebagai usaha membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat, bangsa serta agama;
- 2) Menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan-kenyataan sosial yang timbul di dalam masyarakat;
- 3) Memberi pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mampu berpikir secara interdisipliner, mampu memahami pikiran para ahli berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian memudahkan mereka berkomunikasi.

Berdasarkan hasil semiloka tahun 1995 dosen-dosen UPI, Mata kuliah dasar umum adalah kelompok matakuliah yang mengkoordinasikan matakuliah-matakuliah yang termasuk pada bidang Pendidikan Umum (*general*), yaitu matakuliah yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif dan keterampilan semata melainkan lebih menekankan pada aspek konatif, bobot moral, mental, nilai serta makna yang menjadi karakter dasar kemanusiaan dengan menggunakan pendekatan multiaspek,

multidimensional, multidisipliner atau interdisipliner. Disinilah posisi pendidikan umum, sebagai pendidikan yang memberi warna atau integrasi antar disiplin ilmu sehinggadapat menjadikan manusia menjadi manusia yang utuh dan menyeluruh (Faiz, 2020).

Program mata kuliah dasar umum ini bisa diberikan pada setiap jenjang pendidikan dengan implementasi pembelajaran melalui sekumpulan pelajaran dasar umum di perguruan tinggi.

Setiap perguruan tinggi memiliki kekhasan mata kuliah dasar umumnya, seperti mata kuliah dasar umum di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung atau yang sering kita sebut Polman Bandung. Di lingkungan kampus Polman, mata kuliah dasar umumnya yaitu terdapat dua bidang mata kuliah yaitu bidang sosial dan humaniora serta Matematika dan sains alam. Bidang sosial dan humaniora terdiri dari Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga dan Pengabdian pada Masyarakat. Sedangkan bidang Matematika dan Sains Alam terdiri dari Kalkulus dan Matematika, Fisika, Kimia dan pengetahuan lingkungan.

Pedoman penyusunan kurikulum Politeknik Manufaktur Negeri Bandung ini disusun dengan merujuk pada:

- 1) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- 2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi,
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 5) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014,
- 6) Perumusan Capaian Pembelajaran Bidang Teknik Terapan, Komisi Pembelajaran, FDPNI, 2014,
- 7) *Curricula 2015, A Four Year Strategic Plan for Manufacturing Education, society of Manufacturing Engineers, 2011,*
- 8) Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pedoman penyusunan kurikulum ini diperuntukkan bagi program studi di semua jenjang

pendidikan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, yaitu program pendidikan Diploma-3 (Ahli Madya) dan Sarjana Terapan. Kurikulum jenjang pendidikan ini merupakan kurikulum program pendidikan tinggi vokasi terapan.

Pendidikan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung adalah suatu upaya kreatif mengembangkan potensi peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang ditunjang keilmuan, yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat dalam membantu mewujudkan cita-cita masyarakat yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. Hal ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan minat dan potensinya. Pendidikan tersebut dilaksanakan melalui bentuk-bentuk berikut ini:

- 1) Pendidikan keahlian yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai akademis yang luhur dan etika profesi.
- 2) Pengembangan kepribadian yang bermartabat. Pengembangan kepribadian ini mencakup:
 - (i) Pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi etika, memiliki etos kerja, sikap serta perilaku yang patut diteladani dalam masyarakat profesi yang digelutinya;
 - (ii) Pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi tata nilai yang luhur, serta sikap dan perilaku yang patut diteladani dalam kehidupan bermasyarakat di mana ia berada.

Matakuliah dan sks minimum yang wajib ada pada kurikulum program studi meliputi:

Tabel 1. Sosial dan Humaniora

No	Mata Kuliah	sks	
		D3	D4
1	Agama	3	3
2	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3
3	Bahasa Indonesia	3	3
4	Bahasa Inggris	2	2
5	Olahraga	2	2
6	Pengabdian pada Masyarakat	-	2
	Jumlah sks	13	15

Tabel 2. Matematika dan Sains Alam

No	Mata Kuliah	sks	
		D3	D4
1	Kalkulus dan Matematika	6	10
2	Fisika (+Praktikum)	4	6
3	Kimia (+Praktikum)	2	4
4	Pengetahuan Lingkungan	2	2
	Jumlah sks	14	22

Dalam menjalankan proses pendidikan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kualitas, kemampuan, sikap dan perilaku bagi lulusan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yang didasarkan pada peran yang diharapkan akan dipegang oleh lulusan tersebut;
- 2) Kendali mutu, baik dalam konsep pendidikan, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikan beserta pembelajarannya, yang harus dilakukan berdasarkan standar akademis dan professional yang berlaku dan diakui di dunia internasional;
- 3) Kesadaran akan adanya kebutuhan pendidikan sepanjang hayat, seiring dengan dinamika

perkembangan ilmu, teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sikap dan proses pembelajaran dalam pendidikan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung berorientasi pada perwujudan lulusan yang memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan pengembangan sebagai hasil dari pengalaman pendidikan dan praktek industri yang sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- 2) Memadukan dan memberdayakan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- 3) Melakukan berbagai upaya dalam menciptakan konsep dan pemikiran ataupun barang atau jasa bagi kemaslahatan masyarakat;
- 4) Bekerjasama serta membawakan dirinya, baik dalam masyarakat profesi dengan melaksanakan etika keprofesionalitasnya maupun dalam masyarakat umum dengan membawakan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional, maka *output* perguruan tinggi diharapkan menjadi pemeluk agama yang taqwa, warganegara yang sadar dan berdisiplin, anggota keluarga yang sakinah, individu yang mampu mengembangkan diri dan membangun lingkungan hidupnya, baik lingkungan sosial, lingkungan budaya maupun lingkungan alamiah. Secara khusus program matakuliah dasar umum bertujuan menghasilkan warga negara yang berkualifikasi sebagai berikut:

- 1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.
- 2) Berjiwa Pancasila, sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memiliki kepribadian yang tinggi yang mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan.
- 3) Memiliki wawasan yang komprehensif dan pendekatan integral dalam menyikapi permasalahan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan maupun pertahanan keamanan.
- 4) Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya maupun lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta dalam pelestariannya.

Tujuan Pendidikan Pancasila yang utama adalah untuk dipahami, dihayati, dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai peran, fungsi, dan kedudukannya masing-masing.

Menurut Model Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian (2003), tujuan dari kuliah Pancasila adalah menjelaskan landasan tujuan Pendidikan Pancasila, Sejarah Paham Kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem

filsafat, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

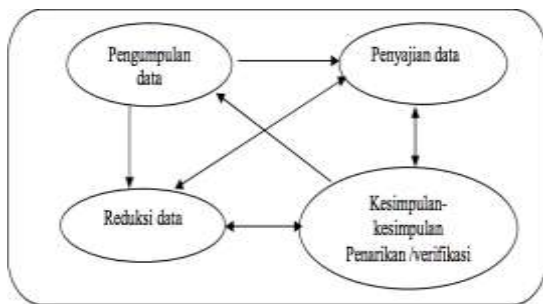
Melalui pembelajaran matakuliah ini, mahasiswa di ajak untuk menjadi salah satu upaya pembangunan karakter yang sesuai dengan Pancasila (RISTEK DIKTI, 2016), mata kuliah wajib umum dalam hal ini yang dimaksud adalah mata kuliah wajib umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Matakuliah Pancasila/Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara spesifik, tujuan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi (Pembelajaran et al., 2013, hal. viii) yaitu, untuk:

- 1) Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 4) Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. karakteristik penelitian adalah *natural setting*, yaitu peneliti mengumpulkan data penelitian di lokasi partisipan alami (Creswell, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi

dilakukan kepada dosen dan mahasiswa. Analisis data penelitian dengan pengumpulan data secara umum dengan didasarkan pada pertanyaan yang bersifat umum dan informasi dari para partisipan (Creswell, 2013) selanjutnya penelitian memulaian analisis hasil data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu reduksi, penyajian, dan pengambilan keputusan sesuai dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yang terletak di Jalan Kanayakan No.21 Dago Bandung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Politeknik Manufaktur Bandung atau yang lebih dikenal dengan Polman Bandung adalah politeknik pertama di Indonesia yang dahulu bernama Politeknik Mekanik Swiss (PMS-ITB). Pendirian Polman Bandung merupakan hasil kerja sama bilateral antara pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan konfederasi Swiss. Berbeda dengan sistem pendidikan akademik yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan IPTEK masyarakat luas, pendidikan tinggi berbentuk Politeknik adalah Pendidikan Tinggi vokasi (Vocational Oriented Higher Education) yang memiliki tugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat langsung memasuki pagar kerja sesuai dengan keahlian yang di milikinya sesuai dengan arti kata vokasional yang bermakna keahlian.

Politeknik Manufaktur Bandung memiliki empat jurusan Teknik dengan program studi dan konsentrasi keahlian yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu:

1. Jurusan Teknik Manufaktur (ME)
 - D-3 Prodi Teknik Pembuatan Perkakas Presisi
 - D-3 Prodi Teknik Pemeliharaan Mesin
 - D-3 Prodi Teknik Mekanik Umum
 - D-4 Prodi Teknik Mesin dan Manufaktur
2. Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur (DE)
 - D-3 Prodi Teknik Perancangan Perkakas Presisi
 - D-3 Prodi Teknik Perancangan Mekanik Umum
 - D-4 Prodi Perancangan Manufaktur
3. Jurusan Teknik Pengecoran Logam (FE)

- D-3 Prodi Teknik Pengecoran Logam
 - D-4 Konsentrasi Teknologi Foundry
4. Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekanika (AE)
 - D-3 Prodi Teknik Mekanika
 - D-4 Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi

Polman merupakan Perguruan Tinggi di Indonesia yang dalam penyelenggaraannya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk dalam penyusunan kurikulum. Panduan penyusunan kurikulum Polman merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia (ayat 3). Mata kuliah tersebut dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma (ayat 5).

Pedoman kurikulum Polman diperuntukkan bagi program studi di semua jenjang pendidikan Diploma-III (Ahli Madya) dan Diploma-IV (Sarjana Terapan). Selain itu, terdapat dua kelompok mata kuliah wajib yang perlu diselesaikan, yaitu kelompok Matematika dan Sains serta Kelompok Sosial dan Humaniora. Kelompok Matematika dan Sains terdiri dari mata kuliah Matematika, Fisika, Kimia, dan Pengetahuan Lingkungan. Sedangkan kelompok Sosial dan Humaniora terdiri dari mata kuliah Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga, Pengabdian pada Masyarakat (khusus D-IV).

Berdasarkan hasil penelitian, Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Kewarganegaraan di Politeknik Manufaktur Negeri ini sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan atau kebijakan mata kuliah wajib umum yang berlaku. Meskipun pedoman kurikulum Polman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sampai saat ini Politeknik Manufaktur Bandung tidak memiliki departemen Mata Kuliah Wajib Umum yang fokus mengurus mata kuliah tersebut, tetapi Mata kuliah wajib umum dititipkan pada Unit Sosio Manufaktur (USM). Hal tersebut dikarenakan seluruh jurusan di Polman merupakan jurusan teknik dan tidak terdapat jurusan yang sesuai dengan mata kuliah wajib umum. Ditambah tidak adanya dosen tetap mata kuliah wajib umum menyebabkan proses persiapan pengajaran hingga evaluasi belum dilakukan secara maksimal.

Sumber daya manusia (pengajar MKWU) di Polman terutama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan awalnya ditangani oleh dosen yang bukan lulusan PKn. Hal tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dosen mata kuliah wajib umum yang telah diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43 tahun 2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi:

- a) Dosen berijazah Magister (S2) Ketahanan Nasional dan Magister (S2) Pendidikan Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Sosial Budaya, Filsafat, dan Hukum yang mendapat pembekalan Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister (S2) dapat diangkat dosen yang minimal berijazah Sarjana (SI) di bidang Pendidikan ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Sosial Budaya, Filsafat, Hukum, dan Sarjana bidang lain yang memiliki wawasan PKn secara memadai dan mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan atau lulusan Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau Sarjana (SI) dengan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan integritas pribadi sebagai dosen yang dinilai memiliki kompetensi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kualifikasi dosen menjadi sangat penting dalam menentukan tujuan pembelajaran mata kuliah wajib umum. Dosen PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan belum tentu memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dalam proses pembelajaran cenderung mengajarkan Ilmu Kewarganegaraan, bukan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kerangka Pendidikan umum.

Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari *Civics*. Ilmu Kewarganegaraan mengambil porsi dari ilmu yang demokrasi politik. Ilmu Kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu yang mendeskripsikan peranan warga negara atau hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam dan tugas-tugas pemerintahan yang dilihatnya dari pendekatan yuridis formal dan sosio-politis. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan *CivicEducation* atau *Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) atau *PoliticalEducation* (Pendidikan Politik) versi Indonesia. PPKn merupakan usaha pembinaan peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 dan yang secara dominan mendasarkan karakter Ilmu politik dalam memprogram dan pengajarannya sehingga diharapkan dapat terwujudnya warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Serta mampu ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan, seperti kemiskinan, masalah penyakit, permasalahan global, dan sebagainya (Parhan & Sukaenah, 2020).

Pemahaman dosen mengenai mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dalam proses pembelajaran, dosen dengan pemahamannya memegang peran penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran.

Keberhasilan sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari peran guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan didukung dengan pemilihan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Disamping menarik perhatian siswa, pendekatan pembelajaran juga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan pada setiap mata pelajaran. (Hidayah, dkk, 2019: 22)

Hasil temuan lain dari penelitian ini adalah masa studi per semester di Polman yang terhitung lama yaitu 21 minggu dan bobot sks yang banyak. Polman menggunakan sistem blok antara teori dan praktek dengan pembagian satu minggu teori lalu dilanjutkan dengan dua minggu praktek. Jika dihitung, maka lama proses belajar efektif di kelas adalah 7 minggu dan praktek industri adalah 14 hari. Berhubung dengan lebih sedikitnya waktu yang dapat digunakan untuk belajar di kelas, maka Polman menyediakan program untuk menyelesaikan mata kuliah wajib umum dalam waktu tiga minggu.

Program percepatan penyelesaian mata kuliah wajib umum selama tiga minggu merupakan solusi bagi mahasiswa dengan jadwal praktek yang begitu padat. Namun, program tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti RI No 44 Tahun 2015: Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pemangkasan waktu studi dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Bahan ajar yang perlu disampaikan selama 16 kali pertemuan akan dipadatkan sehingga dapat disampaikan dalam waktu 3 minggu. Pembelajaran satu mata kuliah yang dilakukan setiap hari akan menyebabkan kebosanan bagi mahasiswa karena akan terasa monoton. Kebosanan tersebut dapat berakibat pada penyerapan serta pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut. Maka dari itu, program mata kuliah wajib umum tiga minggu belum bisa dikatakan efektif.

Mata kuliah wajib umum di Polman tidak diajarkan pada semester awal (semester 1 dan 2), tetapi pada semester akhir (semester 5). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa yang hendak terjun ke dunia kerja telah memiliki bekal untuk hidup bermasyarakat yang sesuai dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jumlah sks mata kuliah wajib umum pancasila dan PKn telah sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 tahun 2006 Pasal 10, yaitu beban studi untuk matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 (tiga) sks (satuan kredit semester).

4. KESIMPULAN

Pengajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Kewarganegaraan di Politeknik Manufaktur Negeri ini sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan panduan kurikulum Polman, MKWU kelompok Sosial dan Humaniora, diantaranya adalah mata kuliah Agama, Pancasila dan KWN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga, Pengabdian pada Masyarakat (khusus D4). Selain itu, penentuan sks MKWU sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun pedoman kurikulum telah merujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan, masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah:

1. Tidak ada departemen mata kuliah wajib umum sehingga MKWU dititipkan pada Unit Sosio Manufaktur (USM)
2. Sumber daya manusia (pengajar MKWU) terutama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan awalnya ditangani oleh dosen yang bukan lulusan PKn.
3. Dosen PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, sehingga dalam proses pembelajaran cenderung mengajarkan ilmu Kewarganegaraan, bukan Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Beban studi per semester dan bobot sks yang banyak dan menggunakan sistem blok antara teori dan praktek di 18 minggu.
5. Adanya MKWU paket selama 3 minggu
6. MKWU tidak diajarkan pada semester awal (semester 1 dan 2), melainkan diajarkan pada semester akhir (semester 5), hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

5. REFERENSI

- Cholisin. 2014. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faiz, A. (2020). Pendidikan nilai dan karakter dalam perspektif pendidikan umum di perguruan tinggi. *Sosioreligi*, 18(2), 1–7.
- Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Purwati. (2021). Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, Volume 5(4), 1766–1777.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1014>
- Parhan, M., & Sukaenah. (2020). Pendekatan Kontekstual Dalam Meningkatkan Pembelajaran a Contextual Approach To Improving Pancasila and Civic Education. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 360–368.
- Hidayah, dkk. 2019. *Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 1, Hlm. 22-33

Kemenristek Dikti. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016

Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43 tahun 2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<https://belmawa.ristekdikti.go.id/pengayaan-mata-kuliah-wajib-umum-di-perguruan-tinggi/>
<https://polman-bandung.ac.id/>